

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar (SD)

Endah Parawangsa¹, Dinie Anggraeni Dewi², Yayang Furi Furnamasari³
^{1,2,3}Universitas Pendidikan Indonesia

Email: endahparawangsa2733@upi.edu¹, dinieanggraenidewi@upi.edu²,
furi2810@upi.edu³

Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salahsatu pendidikan yang diterapkan sejak berada di Sekolah Dasar (SD). Fungsinya sebagai pendidikan nilai dan moral. Tujuan dari diberikannya pendidikan kewarganegaraan sejak dini adalah untuk membentuk warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan di SD mencakup beberapa hal yang pada hakikatnya adalah memfokuskan warga negara Indonesia yang cerdas terampil, dan berkarakter sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci: Hakikat, Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Dasar.

Abstract

Citizenship Education is one of the educations implemented since elementary school. Its function is as an education of values and morals. The purpose of providing citizenship education from an early age is to form good citizens. Citizenship education in elementary schools includes several things which essentially focus on Indonesian citizens who are intelligent, skilled, and have character as mandated by Pancasila and the 1945 Constitution.

Keywords: Itself, Citizenship Education, Elementary School

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Manusia dianugerahi akal untuk berpikir hingga akhirnya dengan nalar itu melahirkan pendidikan yang bermakna. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salahsatu pendidikan yang harus disampaikan karena erat keitannya dengan karakteristik manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berbangsa dan bernegara khususnya di Indonesia.

Esensi dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk warga negara yang baik sesuai konstitusi yang berlaku. Untuk itu, membentuk karakter bukanlah satu hal yang mudah. Untuk itu, perlu diberikan pendidikan kewarganegaraan sejak dasar yaitu di Sekolah Dasar agar apa yang disampaikan melekat menjadi karakter saat tumbuh dewasa.

Tujuan dilakukannya penelitian ini selain untuk mengetahui hakikat Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah Dasar (SD) juga unuk mengetahui fungsi dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan diberikan agar tercipta konsep yang terstruktur dalam memberikan pendidikan yang sejak di jenjang dasar.

Lengeveld menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha mempengaruhi, melindungi serta memberikan bantuan yang tertuju kepada kedewasaan anak didiknya atau dengan kata lain membantu anak didik agar cukup mampu dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. (Suriansyah, A:2011)

Pendidikan Kewarganegaraan menurut Suwadi adalah suatu usaha sadar pemerintah dalam menanamkan konsep kebangsaan yang multi dimensional yang berkaitan dengan dasar-dasar pengetahuan tentang penanaman nilai-nilai kewarganegaraan (civic values) atau nilai kebangsaan, sosiologi politik/masyarakat politik, demokrasi dan persiapan anak bangsa untuk berparti sipasi dalam proses politik secara menyeluruh) agar menjadi warga negara yang baik. (Suwadi:2007)

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar dimaksudkan untuk menanamkan rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, serta membentuk kepribadian bangsa yang sesuai dengan falsafah, pandangan hidup, ideologi, dan dasar negara yaitu Pancasila. (Syam Norman:2011)

Mardalena berpendapat bahwa hakikat PKn di SD adalah memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. (Mardalena, SR:2012)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbasis metode kualitatif dengan meninjau permasalahan Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar menggunakan kajian literatur. Kajian literatur ini bersumber dari artikel, jurnal, dan buku cetak. Berbeda dengan kuantitatif, metode kualitatif ini berbasis data atau temuan ataupun teori, yang nantinya akan menjadi temuan baru tanpa melakukan penelitian lapangan atau hal semacamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikan lah yang menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. Walaupun tidak semua orang berpendapat seperti itu, namun pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan manusia nomor wahid. Bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk dan terasah melalui pendidikan. Pendidikan juga umumnya dijadikan tolak ukur kualitas setiap orang. (PGSD:2018)

Pendidikan dalam bahasa Inggris berarti education. Sedangkan dalam bahasa latin adalah educatum yang berasal dari kata E dan Duco, E artinya perkembangan dari luar dari dalam ataupun perkembangan dari sedikit menuju banyak, sedangkan Duco artinya sedang berkembang. Dari sini, pendidikan bisa juga disebut sebagai upaya guna mengembangkan kemampuan diri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan ialah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan.

Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pengertian pendidikan ialah tuntunan tumbuh dan berkembangnya anak. Lengeveld (Suriansyah, A:2011) menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha mempengaruhi, melindungi serta memberikan bantuan yang tertuju kepada kedewasaan anak didiknya atau dengan kata lain membantu anak didik agar cukup mampu dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Sedangkan, menurut UU sisdiknas ini pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Pendidikan yang diberikan pada anak sekolah dasar diantaranya adalah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan dikenal dengan Pendidikan Kewiraan yang lebih menekankan pada Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Dalam bahasa latin Kewarganegaraan disebut "civis"selanjutnya dari kata "civis" ini dalam bahasa inggris timbul kata "civic" artinya mengenai warga Negara atau kewarganegaraan dari kata "civic" lahir kata "civics" ilmu Kewarganegaraan. *Civic Education*, dan Pendidikan Kewarganegaraan. (Kansil: 2005:3) Pendidikan Kewarganegaraan menurut Suwadi adalah suatu usaha sadar pemerintah dalam menanamkan konsep kebangsaan yang multi dimensional yang berkaitan dengan dasar-dasar pengetahuan tentang penanaman nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*) atau nilai kebangsaan, sosiologi politik/masyarakat politik, demokrasi dan persiapan anak bangsa untuk berparti sipasi dalam proses politik secara menyeluruh) agar menjadi warga negara yang baik.(Suwadi:2007).

Dalam Kurikulum 1946, Kurikulum 1957, dan Kurikulum 1961 tidak dikenal adanya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam kurikulum 1946 dan 1957 materi

tersebut itu dikemas dalam mata pelajaran Pengetahuan Umum di SD atau Tata Negara di SMP dan SMA. Baru dalam Kurikulum SD tahun 1968 dikenal mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN). Menurut kurikulum SD 1968 Pendidikan Kewargaan Negara mencakup Sejarah Indonesia, Geografi, dan Civics yang diartikan sebagai pengetahuan Kewargaan Negara. Dalam kurikulum SMP 1968 PKN tersebut mencakup materi sejarah Indonesia dan Tata Negara, sedang dalam kurikulum SMA 1968 PKN lebih banyak berisikan materi UUD 1945. Sementara itu,, menurut kurikulum SPG 1969 PKN mencakup sejarah Indonesia, UUD, Kemasyarakatan, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) 1973 terdapat mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) dan Pengetahuan Kewargaan Negara. Sedikit berbeda, menurut kurikulum PPSP (Proyek Perintis Sekolah Pembangunan) 1973 diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara/Studi Sosial untuk SD 8 tahun yang berisikan integrasi materi ilmu pengetahuan sosial. Sedangkan di Sekolah Menengah 4 tahun selain "Studi Sosial" terpadu, juga terdapat mata pelajaran "PKN" sebagai program inti dan "Civics dan Hukum" sebagai program utama pada jurusan sosial. (Winataputra, H. U. S, 2020:1.3).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar dimaksudkan untuk menanamkan rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, serta membentuk kepribadian bangsa yang sesuai dengan falsafah, pandangan hidup, ideologi, dan dasar negara yaitu Pancasila. (Syam Norman:2011). Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang berfungsi sebagai pendidikan nilai dan moral, yaitu mata pelajaran yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila/budaya bangsa sehingga membentuk moral anak yang sesuai dengan nilai falsafah hidupnya (Nashar, 2004.). Sapriya dalam (Dunia Pendidikan:2021) tujuan pendidikan Kewarganegaraan ialah Partisipasi yang penuh nalar serta tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat pada nilai-nilai juga prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi warga negara yang efektif serta penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan, keterampilan intelektual dan keterampilan untuk berperan serta. Menurut Lampiran Permendiknas No. 22 Tahun 2006 dikemukakan bahwa "Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945", sedangkan tujuannya, digariskan dengan tegas, " adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta antikorupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi."

Pentingnya peran PKn dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat (*long life education*), melalui pemberian keteladanan, pembangunan kemauan, dan pengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran maka melalui PKn sekolah perlu dikembangkan sebagai pusat pengembangan wawasan, sikap, dan keterampilan hidup dan berkehidupan yang demokratis untuk membangun kehidupan demokrasi. Pendidikan persekolahan seharusnya dikembangkan sebagai wahana sosial kultural untuk membangun kehidupan yang demokratis. Dengan cara itu akan memungkinkan siswa dapat belajar demokrasi dalam situasi yang demokratis dan untuk tujuan melatih diri sebagai warga negara yang demokratis dan membangun kehidupan yang lebih demokratis.

Dengan pendidikan kewarganegaraan ini para generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM. Dengan bekal keadaran ini, mereka akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi

bangsa, seperti konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, dengan cara-cara yang damai dan cerdas. (Blog Guru:2018). Berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Persatuan dan Kesatuan bangsa
2. Norma, hukum dan peraturan
3. Hak asasi manusia
4. Kebutuhan warga negara
5. Konstitusi Negara
6. Kekuasaan dan politik
7. Pancasila
8. Globalisasi

Ruang lingkup ini bukan tanpa tujuan yang jelas namun, tentunya menjadi salahsatu sarana pendekatan pada hakikat pendidikan PKn sebagaimana yang disampaikan Magdalena (Magdalena I:2020) bahwa hakikat PKn di SD adalah sebagai program pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai pancasila untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa yang diharapkan menjadi jati diri yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dalam kehidupan sehari hari. Pelajaran yang dalam pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial, budaya, bahasa, usia, dan suku bangsa yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter seperti yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945. Ditegaskan pula oleh pendapat Mardalena (Mardalena SR:2012) hakikat PKn di SD adalah memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter seperti yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945.

SIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan dikenal dengan Pendidikan Kewiraan yang lebih menekankan pada pendidikan pendahuluan bela negara. Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan kepada siswa Sekolah Dasar ini merupakan suatu usaha sadar dari pemerintah dalam menanamkan konsep kebangsaan yang multi dimensional yang berkaitan dengan dasar-dasar pengetahuan tentang penanaman nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*) atau nilai kebangsaan, sosiologi politik/masyarakat politik, demokrasi dan persiapan anak bangsa untuk berparti sipasi dalam proses politik secara menyeluruh) agar menjadi warga negara yang baik.

Fungsi serta tujuan Pkn ini menjadikan warga negara yang baik sejak dini memiliki ruang lingkup yang merupakan pendekatan pada hakikat Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri mengapa diberikan di Sekolah Dasar yaitu memfokuskan pembentukan warga negara yang memahami serta mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter seperti yang diamanatkan oleh pancasila dan UUD 1945 yang tentunya bermanfaat bagi kemajuan bangsa kedepannya. Mewujudkan warga negara yang baik sejak dini bukanlah hal yang mudah untuk itu orang tua, guru pemerintah dan siswa perlu bersinergi terintegrasi demi terwujudnya warga negara Indonesia yang baik sesuai dengan implementasi Pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Winataputra, H. U. S. (2020). Hakikat, Fungsi, Dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan Di Sd. *Pembelajaran Pkn Di Sd*, 1-1. [2]
- PGSD. (2018). Definisi Tujuan dan Fungsi Pendidikan. <https://pqsd.upy.ac.id/index.php/jadwal/profil-lulusan/2-uncategorised/12-pendidikan>.
- Suriansyah, A. (2011). Landasan pendidikan.
- Subadi (2007). Pendidikan Kewarganegaraan. Surakarta: Badan Penerbit BP FKIP UMS

- Winataputra, U.S. (2001). *Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi*. (Disertasi) Bandung: universitas Pendidikan Indonesia.
- Syam Norman. (2011). Peningkatan Kualitas Pembelajaran PKn Di Sekolah Dasar Melalui Model Pengajaran Bermain Peran.
- Mardalena, SR (2012). Penerapan Pendekatan Kontektual Teaching and Learning (CTL) Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar pada Pembelajaran PKn kelas V C SDN 2 Metro Timur Tahun Pelajaran 2011/2012. (Skripsi) Lampung: Universitas Lampung
- Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Depdiknas.
- Nashar. (2004). Peranan Motivasi & Kemampuan Awal. Delia Press. Jakarta.
- Dunia Pendidikan (2021). Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan.
<https://duniapendidikan.co.id/pkn-sd/>
- Somantri, N. (1968). *Pendidikan Kewargaan Negara di Sekolah*. Bandung: IKIP.
- [13]Blog Guru. (2018).Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Generasi Muda Indonesia. <https://www.sman1ampekangkek.sch.id/blog/pentingnya-pendidikan-kewarganegaraan-bagi-generasi-muda-indonesia/>
- Nany B, (2021). Pentingnya Pendidikan PKn di SD Untuk Pendidikan Karakter Siswa Usia Dini. <http://koranbogor.com/lainnya/pendidikan/pentingnya-pendidikan-pkn-di-sd-untuk-pendidikan-karakter-siswa-usia-dini/>
- Magdalena I, (2020). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar Negeri Bojong 3 Pinang. Tangerang: Universitas Muhammadiyah Tangerang.